

Kebijakan Pengendalian Laju dan Lajur Becak Motor (Studi Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar)

Muhammad Nur Yamin¹, Nur Amalia²

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email: nuryamin1@gmail.com¹,

nuramalia1565140017@gmail.com²

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengendalian becak motor di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, penganalisaan melalui model yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian implementasi kebijakan Perwali Nomor 22 Tahun 2012 tentang pengendalian becak motor di Kota Makassar pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar belum berjalan dengan baik, terutama indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan indikator sikap atau kecenderungan para pelaksana dan komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana sudah berjalan baik. Sehingga menimbulkan dampak terhadap pengendalian operasional becak motor saat ini yaitu kurangnya pengawasan sehingga masih banyaknya bentor yang belum menaati arus lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan Kota Makassar. Pengendalian becak motor perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan hukuman oleh pelaksana yang terlibat dilapangan terhadap bentor agar tidak melanggar rambu lalu lintas yang ada dan memberikan sosialisasi secara merata tentang daerah operasi dan pelarangan pengoperasian bentor di Kota Makassar.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengendalian becak motor

Abstract. The research aims to find out the implementation of the motorized pedicab control policy in the District of Tamalate Makassar City, analysis through the model proposed by Van Meter and Van Horn. Explorative research methods with a qualitative approach, data collection techniques with interviews, observation, and documentation. The results of research on the implementation of Perwali No. 22/2012 on motorized pedicab control in Makassar City in Tamalate Sub-District of Makassar City have not been going well, especially the standard indicators and policy targets, resources, implementing agent characteristics, and the economic, social, and political environment. While indicators of attitudes or tendencies of implementers and inter-organizational communication and activities of implementers are already going well. Resulting in an impact on the operational control of motorized pedicab at this time is the lack of supervision so that there are still a lot of bentor that has not obeyed the traffic flow that can cause congestion in Makassar City. The control of the motorized pedicab needs to improve supervision and enforcement of penalties by the implementers involved in the field of the collision so that it does not violate existing traffic signs and provide even dissemination of the area of operation and the prohibition of the operation of the collision in Makassar City.

Keywords: policy implementation, motorized pedicab control

PENDAHULUAN

Becak termasuk salah satu alat transportasi darat yang masih tradisional, walaupun becak hampir punah dan mulai ditinggalkan oleh masyarakat yang bersifat lebih fleksibel untuk perjalanan jarak pendek dan lokal yang dapat mengangkut penumpang 1-2 orang mendorong, munculnya suatu moda baru dibidang transportasi angkutan umum di berbagai kota di Indonesia salah satunya di kota makassar yang disebut biasa dengan istilah becak bermotor (bemtor).

Bemtor merupakan alat transportasi yang mempunyai kemampuan menjangkau pelosok kampung (gang atau lorong) wilayah pemukiman

dan kompleks perumahan di wilayah perkotaan, waktu tempuh relatif cepat, muatan lebih banyak, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat kelas bawah menjadi daya tarik moda angkutan bemtor, namun keberadaan bemtor di Kota Makassar saat ini mulai menyebabkan kemacetan karena sering berada di jalan protokol. Banyaknya jenis transportasi kota berlalulalang membuat Kota Makassar semakin tidak terkendali, contoh angkutan umum mikrolet (pete-pete), taxi on line, ojek on line, dan becak motor yang saat ini ramai di perbicangkan.

Munculnya fenomena bemtor di Kota Makassar dikarenakan adanya kebutuhan

masyarakat yang meningkat di bidang jasa transportasi sehingga laju pertumbuhan bebtor sudah tidak terkendali dan terkesan semrawut. Berdasarkan data yang dimiliki oleh dinas perhubungan dan polrestabes makassar jumlah bebtor yang didata oleh asosiasi bebtor sendiri pada tahun 2012 telah mencapai 11.000 unit, di tahun 2017 sudah mencapai 24.000 unit (Dinas Perhubungan Kota Makassar).

Pemerintah daerah Kota Makassar dalam melihat hal ini ikut andil untuk pengendalian tersebut hingga mengeluarkan peraturan Walikota Makassar mengenai zona wilayah operasional bebtor yakni Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2012 tentang pengendalian operasional kendaraan bebtor. Pemerintah Kota Makassar tak berdaya jika harus sendiri menangani aturan tersebut sehingga ditaati oleh pihak yang terkait, terlebih lagi saat ini keberadaan bebtor di makassar dianggap telah melanggar dan mesti ditertibkan langsung, kepolisian dalam hal ini berwenang menertibkan kendaraan di jalan raya. selain kepolisian, dinas perhubungan juga ikut bertugas untuk penataan operasi becak motor agar tata ruang operasional memperhatikan akses kendaraan umum di wilayah Kota Makassar.

Hadirnya Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 semestisnya sudah ada batasan yang jelas terhadap ruang lingkup operasional becak motor di Kota Makassar, tapi fakta yang terjadi aktifitas operasional becak motor telah melanggar batasan yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2012, banyak yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan Walikota tersebut seperti ruas Jl. AP Pettarani, Jenderal Sudirman, Ratulangi, Termasuk di Jl Urip Sumoharjo. dimana kondisi ini sudah berlangsung lama. Namun, tidak ada upaya penertiban dari pihak terkait. Hal ini menjadi masalah baru yang dihadapi oleh Kota Makassar terkhususnya dibidang transportasi, Dinas Perhubungan Kota Makassar selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah transportasi sepertinya belum sepenuhnya efektif terkhusus dalam menangani masalah operasional becak motor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2012 tentang Pengendalian Becak Motor di Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

TINJAUAN PUSTAKA

a. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut D. Easton dalam Luankali (2007) kebijakan publik "sebagai alokasi nilai-nilai secara

otoritatif untuk keseluruhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada argumentasi Easton bahwa hanya pemerintah sajalah yang bertindak secara otoritatif terhadap masyarakat secara keseluruhan, oleh karena tindakan pemerintah itu merupakan hasil pilihan untuk berbuat sesuatu. Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014) "*Public policy is whatever the government choose to do or not to do*". Menurut J.Gordon dalam Mulyadi (2015), Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterrestasikan, dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Lester dan Stewart dalam buku Kusumanegara (2010), implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Howlett dan Ramest dalam Agustino (2016), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "*The process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice*". Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

b. Konsep Pengendalian

Menurut Mapaenre (2009) pengendalian dalam Ilmu Administrasi Negara sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengendalian merupakan proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengawasan dengan pengendalian adalah pada wewenang dari pengembang kedua istilah tersebut. Pengendalian Becak Motor di Kota Makassar merupakan proses peman-tauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Pada peraturan walikota Makassar nomor 22 tahun 2012 pasal 2 berbunyi: wilayah operasional becak motor ditetapkan pada kawasan pemukiman Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Manggala.

c. Model-model Implementasi Kebijakan

Model implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Horn dalam Agustino (2016) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan : Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan- hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.
- 2) Sumber Daya : Keberhasilan proses impleientasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu di perhitungkan ialah sumber daya finansial dan waktu.
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana : Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.
- 4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana: Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
- 5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana: Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses impelentasi, maka asumsunta kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik: Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2013) berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi dan dampak suatu program, yakni; 1) kondisi lingkungan; 2) hubungan antar organisasi; 3) sumberdaya organisasi untuk implementasi program; 4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, lokasi penelitian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Adapun dalam penelitian ini, implementasi akan diukur dengan menggunakan pendekatan proses (*process approach*) yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Adapun indikator-indikator yang termuat dalam pendekatan proses adalah: a. ukura dan tujuan kebijakan b. sumber daya. c.karakteristik agen pelaksana d. sikap atau kecenderungan para pelaksana e. komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, dan f. lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Selanjutnya data yang diperoleh yaitu melalui metode observasi, wawancara, dan dokumen, untuk memperoleh informasi tentang impelementasi pengendalian kebijakan becak motor (bemtor) dikecamatan tamalate kota makassar. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Pegawai Kantor Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Anggota Polisi Lalu Lintas, Masyarakat Yang Menggunakan Becak Motor, Pemilik Becak Motor, sedangkan sumber data skunder diperoleh dari berbagai media seperti buku, jurnal, koran, buletin, undang-undang dan dokumen lainnya. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis ata deskriptif kualitatif, model Miles dan Huberman (sugiyono, 2013) yaitu: Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Data Display*), Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verfivation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pengendalian Becak Motor (Bemtor) Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, merupakan fenomena yang sekarang mulai mengganggu lalu lintas di Kota Makassar. Hasil Penelitian terkait pengendalian becak motor di kota makakassar berfokus di Kecamatan Tamalate dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan adalah salah satu rangkaian konsep asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kinerja implementasi dapat diukur tingkat keber-

hasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis. Menurut Subarsono (2013) apabila standar dan sasaran kebijakan kabur maka akan terjadi konflik diantara para agen implementasi.

Pengendalian becak motor saat ini di kota makassar belum memiliki standar kelaikan jalan dilihat dari spesifikasi dan rekayasa rumah-rumah sebagai kendaraan bermotor yang beroda tiga untuk angkutan penumpang yang belum cukup aman dimana Dinas Perhubungan dan Kantor Kecamatan Tamalate serta Kapolsek Tamalate Kota Makassar, mereka berpatokan dengan Peraturan Wali Kota no. 22 tahun 2012 tentang pengendalian operasional kendaraan motor becak pada kawasan pemukiman pada kota makassar agar terhindar dari kecelakaan di jalan protokol.

Pengendalian Becak Motor di Kecamatan Tamalate Kota Makassar saat ini belum maksimal penanganannya dikarenakan regulasi kelaikan jalan becmotor belum jelas. Dalam tahapan awal implementasi, harus ada kejelasan dan kesepakatan mengenai tujuan dan sasaran apakah yang akan dituju. buku Abdulkahar, Teguh Yuwono (2003: 117-119). Pengendalian becak motor di kota makassar belum memiliki standar kelaikan jalan dilihat dari spesifikasinya dari rekayasa rumah-rumah sebagai kendaraan bermotor yang beroda tiga untuk angkutan penumpang belum cukup aman dimana Dinas Perhubungan, Kantor Kecamatan Tamalate, dan Kapolsek Tamalate Kota Makassar mereka berpatokan dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang pengendalian operasional kendaraan motor becak pada kawasan pemukiman pada kota Makassar, hanya ditempatkan di wilayah pemukiman. Itupun untuk empat kecamatan yakni, Tamalanrea, Biringkanayya, Tamalate dan Manggala. Faktanya pengendalian operasional kendaraan becak motor dalam wilayah Kota Makassar belum mampu diterapkan secara efektif dikarenakan sulitnya untuk berdialog kepada para pemilik dan pengendara becak motor mengenai batas wilayah operasionalnya dan tidak adanya inisiatif mengubah model rangka becak motornya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2) Sumber Daya

Keberhasilan proses implemmentasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumberdaya manusia,

sumberdaya- sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga yaitu sumberdaya finansial. Tahap-tahap dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya kurang, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk dijalankan. Personal yang bertanggung jawab dalam mengawasi operasional becak motor yang ada terbatas kemudian peraturan yang mengatur batasan-batasan seperti regulasi belum memadai, sehingga dinas perhubungan dan kapolsek tamalate Kota Makassar melakukan pengawasan namun belum maksimal mengawasi dan membina jika melanggar, sehingga dalam melakukan pengawasan sudah tidak lagi efektif. Sedangkan dari finansial itu sendiri terdiri dari dana pemerintah yang ingin merubah kualifikasi becmotor itu sendiri belum berjalan dengan efektif sehingga tidak dapat bersaing sebagai moda angkutan penumpang di kalangan masyarakat saat ini. Menurut Yuwono (2003) adanya dukungan berbagai kombinasi sumber daya yang cukup dalam setiap tahapan implementasi kebijakan. Iniartinya kontinuitas dukungan sumberdaya dalam setiap tahapan implementasi kebijakan harus dipersiapkan secara baik dan matang.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus dapat mengidentifikasi Karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Semua Stakeholder harus bekerja sama mulai dari kepala dinas perhubungan, kapolsek, dan kepala kecamatan untuk dapat maksimal, namun saat ini belum maksimal dalam menerapkan peraturan walikota Nomor 22 Tahun 2012. Selain itu dinas perhubungan terkendala dengan dana sedangkan dari Kantor Camat Tamalate terkendala dengan personil mereka yang kurang.

Peraturan pelarangan pengoperasian becak motor telah ada dan berhasil diterapkan Dinas Perhubungan, Kantor Camat Tamalate, Serta Kapolsek Tamalate Kota Makassar, namun mereka mengatakan belum maksimal dalam menerapkan peraturan walikota yang ada namun berupaya semaksimal mungkin agar tidak melanggar rambu-rambu yang ada.

Sosialisasi pelarangan operasi bemtor oleh dinas perhubungan telah dilakukan namun terkait dengan ingin melakukan perubahan terhadap bemtor masih membutuhkan biaya atau sumber finansial dalam merenovasi bemtor-bemtor yang ada dan Kapolsek Tamalate telah melakukan sosialisasi terkait pelanggaran dan 4 pemukiman yang boleh beroperasi, sedangkan pihak Kecamatan Tamalate melakukan sosialisasi secara persuasive kepada pengendara bemtor namun belum merata. Menurut George C. Edwards III dalam Subarsono (2013) watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dasar dan tujuan merupakan suatu hal yang penting. Pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Begitupula penerimaan terhadap ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil. Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Tujuan pengendalian bemtor saat ini agar tidak beroperasi di jalan protokol seperti (Jalan Pettrani, Jendral Sudirman, Ahmad Yani, dan Pantai Losari), dimana pihak kepolisian melakukan tindakan hanya memeriksa kelengkapan surat kendaraan seperti STNK, dan SIM yang masih berlaku atau tidak, jika tidak mereka akan menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan. Warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan bemtor yang mereka rasakan dimana pengawasan belum maksimal dilakukan aparat terkait, dikarenakan regulasi dari pemerintah belum jelas, sehingga kurangnya personil pengawasan operasional bemtor yang ada dilapangan. Menurut George C. Edwards III dalam Subarsono (2013) keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Warga masyarakat setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan

karena mereka rasakan dimana pengawasan belum maksimal dikarenakan regulasi dari pemerintah belum jelas, sehingga kurangnya personil pengawasan untuk bemtor yang ada dilapangan.

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Menggunakan aspek koordinasi antar organisasi atau kerja sama antara instansi yang pasalnya penertiban tak hanya melibatkan lintas sektor yang juga memiliki tanggungjawab untuk menertibkan bemtor dalam pengoperasian. Kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan, Kantor Kecamatan Tamalate dan Kapolsek Tamalate Kota Makassar telah bekerja sama antar instansi dimana masih ada kesalahan-kesalahan akan tetapi sangat kecil terjadi, namun tetap ada yang membedakan masing-masing tugas dan wewenang yang dijalankan. Pemerintah menempatkan satuan Polisi sebagai yang berwenang untuk menegakkan hukum berupa teguran lisan, teguran tertulis atau tilang dan penyitaan bemtor sementara itu Dinas Perhubungan berwenang melaksanakan pengawasan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dengan tetap berkoordinasi dengan unsur Kepolisian dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Kepolisian dan Dinas Perhubungan dan, tujuan bersama yang merupakan standar yang ingin dicapai menjadi suatu motivasi untuk kedua belah pihak yang berkoordinasi, serta komitmen, yang merupakan tingginya partisipasi dan loyalitas kedua belah pihak dalam kegiatan koordinasi. Menurut Subarsono (2013) Dalam hubungan antar organisasi implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Satuan Lalu Lintas Kota Makassar dengan Dinas perhubungan Kota Makassar meananggulangi penertiban bemtor di Kota Makassar berkoordinasi untuk terlaksananya aturan melalui berbagai tindakan agar tidak terjadi kekacauan, Percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan saling menyesuaikan tugasnya dengan anggota atau antar satuan organisasi lainnya, agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang baik antar lembaga pelaksana kebijakan itu akan mempengaruhi keberhasilan implementasi (Abdulkahar, Teguh Yuwono, 2003). Komunikasi antar-organisasi atau koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya. Implementasi sebuah program perlu dukungan hubungan antar antar organisasi (koordinasi) dengan instansi lain untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku atau kegiatan manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang terbatas sehingga fungsi atau peranan SDA tersebut dapat dipertahankan dan bahkan penggunaannya dapat ditingkatkan dalam jangka panjang atau berkelanjutan. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang di dalamnya menggambarkan suasana sosial maupun suasana fisik, dimana manusia hidup dan bertumbuh kembang didalamnya,. Lingkungan sosial dapat berupa dalam wujud kebudayaan diajarkan kepada seorang individu, ,maupun berdasarkan pengalaman seorang individu atau mungkin interaksi sosial yang terjalin. Lingkungan politik ini dibutuhkan agar kita dapat merujuk pada kajian intelektual tentang fenomena-fenomena lingkungan yang terjadi. Entah itu relasi antar masyarakat dengan lingkungan, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggapi masalah lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan ketua komunitas bemtor mengetahui adanya Perwali Nomor 22 tahun 2012 tentang pelarangan bemtor di jalan protokol, namun meminta pemerintah tentang pengoperasian bemtor yang ada di Kecamatan Tamalate Kota Makassar memberikan ruang atau mewadahi mereka sebagai sebuah moda transportasi yang legal agar bisa bersaing dengan pengguna angkutan umum lainnya. Masyarakat pengguna jasa bemtor berpandangan becak motor saat ini merasa tidak aman dan kurang nyaman bagi keselamatan penumpang, belum memiliki standar kualitas laik jalan, sedangkan kendaraan online lebih nyaman dan tarif lebih murah ketimbang bemtor. Menurut Teguh Yuwono (2003) ada tidaknya keterbatasan-keterbatasan eksternal yang parah jika terdapat penolakan yang besar dari kalangan eksternal organisasi publik, maka jelas implementasi kebijakan akan gagal. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik dari pemilik bemtor dimana pemerintah belum memberikan

ruang atau mewadahi sebagai sebuah moda transportasi legal agar bisa bersaing dengan pengguna angkutan umum lainnya.

Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi serta politik dari tempat kebijakan tersebut dijalankan, Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi ekonomi, social dan politik dari pemilik bemtor dimana pemerintah belum memberikan ruang atau mewadahi sebuah transportasi agar bisa bersaing dengan pengguna angkutan umum lainnya.

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengendalian Becak Motor Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Model implementasi kebijakan van meter dan van horn menetapkan beberapa indikator yang sudah berperan baik dan berperan kurang baik yang dapat mempengaruhi implementasi.

Tabel 1. Indikator kebijakan publik Van Meter Van Horn Dalam Pengendalian Becak Motor di Kecamatan Tamalate Kota Makassar

No	Indikator Variabel	Baik	Kurang Baik
1	Ukuran Standar Kebijakan	-	✓
2	Sumber Daya	-	✓
3	Karakteristik Agen Pelaksana	-	✓
4	Sikap atau kecenderungan pelaksana	✓	-
5	Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	✓	-
6	Lingkungan, Sosial, Ekonomi, dan Politik	-	✓

Sumber: Hasil olahan data primer, 2019

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013) mengemukakan enam faktor berperan dalam implementasi kebijakan publik yaitu; standar sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Indikator yang dominan dalam implementasi kebijakan pengendalian becak motor di Kecamatan Tamalate Kota Makassar adalah standar sasaran kebijakan dan sumber daya yang dikarenakan jika standar sasaran kebijakan dan sumber daya bisa berjalan baik maka indikator yang lainnya akan berjalan baik pula.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Perwali Nomor 22 Tahun 2012 tentang pengendalian becak motor di Kota Makassar pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar belum berjalan dengan baik berlandaskan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn, melalui beberapa indikator yang belum berjalan baik mempengaruhi implementasi yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan indikator sikap atau kecenderungan para pelaksana dan komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana sudah berjalan baik. Dampak yang ditimbulkan terhadap pengendalian kebijakan becak motor saat ini yaitu kurangnya pengawasan sehingga masih banyaknya bentor yang belum menaati arus lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan Kota Makassar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementistek Dikti, Bapak Rektor Universitas Makassar, yang telah memberikan hibah penelitian melalui skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNM dan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah memberi fasilitas, melakukan monitoring, dan mengevaluasi kegiatan penelitian hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Luankali, Bernadus. 2007. Analisis kebijakan publik dalam proses keputusan. Jakarta: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyadi, Dedi. 2015. Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Bandung: Alfabeta.
- Kusumanegara, Salahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik.. Yogyakarta. Gava Media
- Mappaenre, Ahmad. 2009. Dasar Dasar Ilmu Administrasi Dan Manajemen. Makassar :.Badan Penerbit UNM.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar- Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung : Alfabeta.

- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri Abdulkahar, Teguh Yuwono. 2003. Kebijakan Publik Konsep Dan Strategi. Semarang: JLP Undip
- Dokumen:
Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Operasional Becak Motor